

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2017/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT SDM KEARSIPAN DAN SERTIFIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SUMITRO
2. Jabatan : DIREKTUR SDM KEARSIPAN DAN SERTIFIKASI
3. NHK : 469635

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/120 m² di KABUPATEN BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/70 m² di KABUPATEN BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.400.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
3. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 644.400.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 644.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.